

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

Arba, 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan ke-6 Sinar Grafika Offset. Jakarta.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media. Jakarta.

HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Julius Sembiring, 2018 *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. STPN Press. Jakarta

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Johnny Ibrahim., 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang

Muahimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Muchisin, Imam Koeswahyono, Soimin., 2019, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, cet. Ke 4, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sirajuddin,dkk,2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.

JURNAL :

Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, 2023, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Jakarta

Ardiansyah, 2020, *Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Yogyakarta

Dayat Limbong, 2017 *Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya*. Jurnal Mercatoria, Medan.

Darma Budi Setiawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah untuk Mendapatkan Kompensasi atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar*. Jurnal Kontruksi Hukum, Denpasar.

Hardianto Djanggih, & Salle. 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Pandecta Research Law Journal. Semarang.

Hernadi Affandi, 2016, *Pengertian Pemerintah Menurut Doktrin*, Materi Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah Prodi Ilmu Hukum Unsika, Karawang

Inu Kencana *dalam* Dudung Abdullah, 2016, Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Positum, Karawang, Halaman 85

Mentari Nikmah,2020. Pertanggung jawaban Individu atas Ganti Rugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten. Arena Hukum 13.3, Yogyakarta.

Mira Novia, Yusriyadi, Y, & Ana Silviana, 2022, *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Semarang.

Putri Lestari, 2020, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. SIGn Jurnal Hukum, Jakarta.

Purwaningdyah Murti & Agus Wahyudi, 2014, *Konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan*. Administrasi Pertanahan. Yogyakarta.

Sutaryono, 2023, *Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan*. SKH Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.

Somardi, 2020, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketetapan MPR No. II/MPR/1933 tentang GBHN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perpres No. 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

WEBSITE :

<https://mediaindonesia.com/> diakses pada 12 Maret 2024

<https://belitung.tribunnews.com/> diakses pada 11 Desember 2023

<https://kbbi.web.id/tanah> diakses tanggal 10 Januari 2024

